



SOSIALISASI
Aplikasi SIMLARAS Bappenas
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018



Dumai, 14 Februari 2018



DASAR PELAKSANAAN

KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

- Pasal 258 ayat 3 mengamanatkan bahwa kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
- Pasal 259 ayat 1 mengamanatkan bahwa untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah. Koordinasi teknis pembangunan tersebut dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan

HASIL PERTEMUAN

- Temu Konsultasi Triwulanan I 2018 Bappenas - Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia, Jakarta, 23 S.D 25 Januari 2018
- Pra Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2018, Jakarta, 7 S.D. 9 Februari 2018

SURAT DIRJEN PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI
 Nomor : 050/351/Bangda Tanggal 23 Januari 2018
 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Tahun 2018

RADIOGRAM DIRJEN BANGDA KEMENDAGRI

- Nomor : 005/542/Bangda Tanggal 1 Februari 2018 tentang Rapat Pra KORTEK Pembangunan Pusat dan Daerah Tahun 2018
- Nomor : 005/844/SJ Tanggal 7 Februari 2018 tentang Pelaksanaan KORTEKRENBANG Tahun 2018

DASAR HUKUM

KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk **mencapai target pembangunan nasional**.

↓

DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS

Untuk **mencapai target pembangunan nasional** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan **koordinasi teknis pembangunan** antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

PASAL 259 AYAT 1

ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

PASAL 259 AYAT 2

ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR

Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

PASAL 259 AYAT 3

JENIS-JENIS KORTEK

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap **perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah**.

PASAL 259 AYAT 4

KOORDINASI KORTEK

TUJUAN DAN KELUARAN

KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

TUJUAN :

1. Identifikasi target pembangunan nasional yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga
2. Identifikasi target pembangunan nasional yang menjadi kewenangan daerah
3. Identifikasi usulan daerah dalam mencapai target pembangunan nasional

KELUARAN :

1. Data target nasional yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga
2. Data target nasional yang menjadi kewenangan daerah
3. Data usulan daerah dalam mencapai target pembangunan nasional

PENYELENGGARAAN

KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

TEMPAT	CAKUPAN PROVINSI
YOGYAKARTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Kepulauan Riau 6. Jambi 7. Bengkulu 8. Sumatera Selatan 9. Bangka Belitung 10. Lampung 11. DKI Jakarta 12. Jawa Barat 13. Banten 14. Jawa Tengah 15. DI Yogyakarta 16. Jawa Timur 17. Bali
TANGGAL	
26 Februari s.d. 2 Maret 2018	

PESERTA

KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

PESERTA PUSAT

1. Kemendagri;
2. Bappenas; dan
3. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

PESERTA DAERAH

Pemerintah Daerah Provinsi yang terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah
2. Bappeda
3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan
4. Kab/kota akan dikomfirmasikan kembali

PEMBAGIAN TUGAS DALAM DESK

KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Kemendagri	Kementerian/Lembaga	Bappenas	Pemerintah Daerah	Notulen (Kemendagri dan Bappenas)
Mengarahkan dan mengatur jalannya Diskusi terkait: 1) Time Management; 2) Analisa Cakupan Pembahasan (Ketersediaan dan masukan data Proyek dalam setiap Topik Pembahasan); 3) Substansi Pembahasan (Pembahasan detail Proyek by Proyek dan/atau Pembahasan Umum/Pokok-Pokok Kebijakan Proyek)	Memberikan masukan substansi atas Proyek K/L dan Proyek Daerah yang diusulkan Daerah	Sebagai Mitra K/L, memberikan masukan substansi atas Proyek K/L dan Proyek Daerah yang menjadi Prioritas Nasional	Memberikan masukan terkait: 1) Tingkat Kebutuhan dan Kesiapan Pelaksanaan Proyek K/L; 2) Proyek Daerah yang dibahas; 3) Lokasi dan target Proyek K/L	Mencatat Hasil Kesepakatan Rakortek



JADWAL REGIONAL I

KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Hotel The Rich – Yogyakarta, 26 Februari s.d. 2 Maret 2018

NO	WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
I. Senin, 26 Februari 2018			
1.	12.00 - 16.00	Registrasi Peserta	
2.	19.00 - 22.00	Malam Ramah Tamah	Sekda Prov DI Yogyakarta
II. Selasa, 27 Februari 2018			
1.	08.00-09.00	Registrasi Peserta	
		Pembukaan:	
		1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	
		2. Laporan Ketua Panitia	Dirjen Bina Bangda
		3. Ucapan Selamat Datang dari Gubernur	Gubernur DI Yogyakarta
2.	09.00-11.00	4. <i>Keynote Speech</i> "Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional Dalam RKP Tahun 2019"	Menteri PPN/Kepala Bappenas
		5. Sambutan Menteri Dalam Negeri sekaligus membuka acara secara resmi	Menteri Dalam Negeri
		6. Doa	
3.	11.00-11.15	COFFEE BREAK	
		Paparan Panel	
4.	11.15-13.00	1. Kebijakan Pembangunan Nasional Dalam RKP Tahun 2019 dan Penjabarannya di Daerah	Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas
		2. Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2019	Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Kemenkeu

JADWAL REGIONAL I

KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

NO	WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
		3. Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Nasional dan Daerah	Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri
5.	13.00-13.30	Penjelasan Teknis tentang Mekanisme Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah	1. Direktur PEIPD, Ditjen Bina Bangda 2. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Bappenas
6.	13.30-15.00	ISHOMA	
7.	15.00-18.00	Pembahasan dan Klarifikasi Desk dalam Kelompok I, II, III dan IV:	1. Direktur SUPD I 2. Direktur SUPD II 3. Direktur SUPD III 4. Direktur SUPD IV 5. Direktur Otda, Bappenas 6. Direktur PWK, Bappenas
		Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan:	
		1. Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
		2. Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional	
		3. Target Pembangunan Nasional di Luar Prioritas Nasional	
		4. Penandatanganan BA hasil pembahasan per-K/LNK	
8.	18.00 - 19.00	ISHOMA	
9.	19.00-22.00	Lanjutan Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
III. Rabu, 28 Februari 2018			
1.	08.30-12.00	Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
2.	12.00-13.00	ISHOMA	

JADWAL REGIONAL I

KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

NO	WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
3.	13.00-17.00	Lanjutan Pembahasan/Verifikasi Usulan	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
4.	17.00-19.00	ISHOMA	
5.	19.00-22.00	Lanjutan Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
IV. Kamis, 1 Maret 2018			
1.	08.30-12.00	Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
2.	12.00-13.00	ISHOMA	
3.	13.00-17.00	Lanjutan Pembahasan/Verifikasi Usulan	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
4.	17.00-19.00	ISHOMA	
5.	19.00-22.00	Lanjutan Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
V. Jumat, 2 Maret 2018			
1.	08.30-12.00	Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
2.	12.00-13.00	ISHOMA	
3.	13.00-13.30	Penutupan	
		1. Pembacaan Hasil Rakortek	Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Bappenas
		2. Sambutan Penutupan	Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri

Catatan: Jadwal acara dapat berubah sewaktu-waktu

TINDAK LANJUT

KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Menjadi bahan masukan dalam penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional :

A. Bagi Pemerintah Pusat

1. Penyempurnaan Program, Kegiatan, Proyek K/L, Lokasi dan Target dalam RKP.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L.
3. Menjadi dasar pembahasan dalam Musrenbang Nasional.

B. Bagi Pemerintah Daerah

1. Penyempurnaan Program, kegiatan, proyek daerah, lokasi dan anggaran daerah pendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dalam rancangan RKP dan Renja PD.
2. Menjadi dasar pembahasan dalam Kortek Provinsi dan Musrenbang Provinsi.



FORMAT untuk DAERAH



FORMAT YANG DIISI OLEH DAERAH

KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

PROVINSI

1. **Format 1** Program/Kegiatan K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional
*(yang harus diisi oleh daerah adalah **Format 1.B** Usulan Daerah Untuk Rancangan Awal Renja K/L);*
2. **Format 2** Program/Kegiatan Provinsi Yang Mendukung Prioritas Nasional;
3. **Format 4** Penyelarasan Proyek K/L Yang Mendukung Target Pembangunan Nasional di Luar Prioritas Nasional Tahun 2019
*(yang harus diisi oleh daerah adalah **Format 4.B** Usulan Daerah Untuk Rancangan Awal Renja K/L);*
4. **Format 5** Penyelarasan Program/Kegiatan Provinsi Yang Mendukung Target Pembangunan Nasional di Luar Prioritas Nasional 2019;

KAB./KOTA

1. **Format 1** Program/Kegiatan K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional
*(yang harus diisi oleh daerah adalah **Format 1.B** Usulan Daerah Untuk Rancangan Awal Renja K/L);*
2. **Format 3** Program/Kegiatan Kabupaten/Kota Yang Mendukung Prioritas Nasional;
3. **Format 4** Penyelarasan Proyek K/L Yang Mendukung Target Pembangunan Nasional di Luar Prioritas Nasional Tahun 2019
*(yang harus diisi oleh daerah adalah **Format 4.B** Usulan Daerah Untuk Rancangan Awal Renja K/L);*
4. **Format 6** Penyelarasan Program/Kegiatan Kabupaten/Kota Yang Mendukung Target Pembangunan Nasional di Luar Prioritas Nasional Tahun 2019.

Menggunakan:
Aplikasi Simlaras Bappenas

WAKTU INPUT

Aplikasi SIMLARAS Bappenas

15- 19 FEBRUARI 2018

Info : 12 Feb. 2018 10:31 (terakhir saat sosialisasi di Provinsi Riau)

Support Team KORTEK RENBANG

Penginputan dimulai pertanggal 15 Februari 2018, Data yang diinput sebelum tanggal tersebut akan dihapus. Terima Kasih.

Maintenance Aplikasi SIMLARAS s.d 14 Februari 2018

FORMAT 1 : PROGRAM/KEGIATAN K/L YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

B) USULAN DAERAH HUNTIK RANCANGAN AWAL RENJAK/L

NO	PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	USULAN OUTPUT (PROYEK) K/L	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	USULAN PAGU	LOKASI		KET
							PROVINSI	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
... Dst									

Referensi PN, PP, KP, ProPN
(Aplikasi KRISNA)

Data Usulan Daerah ke K/L – Kewenangan Pusat
(Aplikasi SIMLARAS)

FORMAT 3 : PROGRAM/KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
URUSAN :

No.	PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN (PROYEK) DAERAH	PROGRAM DAERAH	PERANGKAT DAERAH	OUTPUT / TAEGET	PAGU (APBD) (RUPIAH)	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Referensi PN, PP, KP, ProPN
(Aplikasi KRISNA)

Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Kab/Kota - APBD)
(Aplikasi SIMLARAS)

FORMAT 4 : PENYELARASAN PROYEK K/L YANG MENDUKUNG TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (DI LUAR PRIORITAS NASIONAL) TAHUN 2019

URUSAN :
K/L :

B) USULAN DAERAH UNTUK RANCANGAN AWAL RENJAK/L

No.	TARGET NASIONAL (SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019)		OUTPUT (PROYEK) K/L	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	USULAN PAGU (RUPIAH)	LOKASI		KET
	INDIKATOR RPJMN	TARGET 2019					PROVINSI	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Referensi Target Pembangunan Nasional RPJMN
(Aplikasi SIMLARAS)

Data Usulan Daerah ke K/L – Kewenangan Pusat
(Aplikasi SIMLARAS)

FORMAT 6 : PENYELARASAN PROGRAM/KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG MENDUKUNG TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (DILUAR PRIORITAS NASIONAL) TAHUN 2019

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
URUSAN :

NO	TARGET NASIONAL (SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019)		KEGIATAN (PROYEK) DAERAH	PROGRAM DAERAH	PERANGKAT DAERAH	OUTPUT/TARGET	PAGU (APBD) (RUPIAH)	LOKASI	KET
	INDIKATOR RPJMN	TARGET 2019							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
dst.									

Referensi Target Pembangunan Nasional RPJMN (Aplikasi SIMLARAS)

Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Kab/Kota - APBD) (Aplikasi SIMLARAS)

RANCANGAN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019

TEMA :
PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

- **Kesinambungan Implementasi *Money Follows Program*** -



Menajamkan Prioritas Nasional

10 PN → 5 PN

30 PP → 25 PP

Memastikan Pelaksanaan Program

Pengendalian Dilakukan Sampai ke Level Proyek (satuan 3)

Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan

Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta

2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019.
 RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

- **Sebagai Penutup Kabinet Kerja** -

2015 → 2016 → 2017 → 2018 → 2019

<p>Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan</p>	<p>Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas</p>	<p>Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah</p>	<p>Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas</p>	<p>Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas</p>
---	--	--	---	---

Rancangan Tema dan Prioritas Nasional RKP 2019



Mainstreaming : **Revolusi mental, kesetaraan gender, lingkungan, dan governance.**

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

- Lokasi : **Provinsi Riau** -

KODE K/L	NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA	PAGU(Rp.)
4	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	24.573.500
10	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	28.540.948
13	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	189.906.108
15	KEMENTERIAN KEUANGAN	54.522.233
18	KEMENTERIAN PERTANIAN	131.943.107
19	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	115.700.000
20	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	56.904.983
22	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	177.474.425
23	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	388.755.678
24	KEMENTERIAN KESEHATAN	107.338.468
25	KEMENTERIAN AGAMA	995.798.080
26	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	11.474.545
27	KEMENTERIAN SOSIAL	27.794.916
29	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	287.055.468
32	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	56.326.293
33	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.795.202.617
40	KEMENTERIAN PARIWISATA	2.264.000
42	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	278.606.452
44	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.526.698

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

- Lokasi : *Provinsi Riau* -

KODE K/L	NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA	PAGU(Rp.)
47	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.755.093
51	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	20.760
54	BADAN PUSAT STATISTIK	89.303.266
56	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	313.248.825
57	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	938.961
59	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.079.100
65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	580.000
67	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	63.921.735
68	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	96.993.288
83	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	1.511.063
87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	165.415
88	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	13.568.398
89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	4.173.143
90	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	11.610
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)	4.587.207
107	BADAN SAR NASIONAL	927.111
115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	149.622.035
117	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	12.344.047
121	BADAN EKONOMI KREATIF	2.117.569
JUMLAH		5.493.577.145

TERIMA KASIH

Disusun Oleh:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jl. Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran
 Walikota Dumai
 Website : <http://bappeda.dumaikota.go.id>
 Email : bappeda@dumaikota.go.id